

## ABSTRAK

Mobilitas masyarakat yang tinggi akan menimbulkan adanya kecenderungan untuk lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi apabila tidak dibarengi dengan peningkatan infrastruktur pendukungnya, yaitu penyediaan transportasi umum. Di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri, pemerintah daerah telah berupaya untuk menyediakan layanan transportasi umum salah satunya dalam bentuk layanan Bus Trans Jogja. Sayangnya adanya bus Trans Jogja ini nyatanya belum mampu mengakomodir dan memecahkan permasalahan kemacetan yang ada di wilayah DIY. Tentunya, pemerintah dituntut untuk membuat kebijakan yang lebih baik dengan cara apapun termasuk melakukan pembelajaran dari kebijakan lain demi menghasilkan perubahan kebijakan yang lebih maksimal. Proses pembelajaran yang digunakan sebagai dasar pemerintah untuk mereformulasi kebijakan disebut dengan pembelajaran kebijakan atau *policy-oriented learning* (POL). Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pembelajaran kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk merespon kebijakan pelayanan transportasi publik Trans Jogja di wilayah DIY melalui beberapa faktor seperti faktor konflik, ketersediaan informasi, umpan balik, dan keterbukaan. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder yang didapatkan dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Unit analisis dari penelitian ini adalah Bappeda DIY dan Dinas Perhubungan DIY sebagai representatif dari pemerintah daerah yang berwenang dalam kebijakan Trans Jogja. Secara keseluruhan, pemerintah telah berupaya melakukan pembelajaran kebijakan yang terlihat dari beberapa perubahan kebijakan yang didasarkan dari faktor pendukung POL. Diharapkan pemerintah tetap melakukan pembelajaran ke depan sehingga dapat terus menghasilkan kebijakan yang lebih optimal.

**Kata kunci:** Transportasi Umum, Trans Jogja, Faktor, Pembelajaran Kebijakan

## **ABSTRACT**

High public mobility will give rise to a tendency to prefer using private vehicles if it is not accompanied by improvements in supporting infrastructure, namely the provision of public transportation. In the Special Region of Yogyakarta itself, the regional government has made efforts to provide public transportation services, one of which is in the form of the Trans Jogja Bus service. Unfortunately, the existence of the Trans Jogja bus has not been able to accommodate and solve the traffic jam problems that exist in the DIY area. Of course, the government is required to make better policies in any way, including learning from other policies in order to produce maximum policy changes. The learning process used as a basis for the government to formulate policies is called policy learning or policy-oriented learning (POL). Therefore, in this research we will discuss the policy learning that has been carried out by the government to respond to Trans Jogja public transportation service policies in the DIY area through several factors such as conflict factors, availability of information, feedback and openness. This research will use qualitative methods and a descriptive approach with a case study type of research. The data sources used are primary and secondary data sources obtained from interviews, observations and documentation studies. The unit of analysis for this research is the Bappeda DIY and the Dinas Perhubungan DIY as representatives of the regional government with authority in Trans Jogja policy. Overall, the government has attempted to carry out policy learning which can be seen from several policy changes based on supporting factors for POL. It is hoped that the government will continue to learn in the future so that it can continue to produce more optimal policies.

**Keyword: Public Transportation, Trans Jogja, Factor, Policy Learning**